

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**LAPORAN SURVEI
KEPUASAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN**

2019



**Laporan Survei
Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
Tahun 2019**

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 selesai disusun. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran respon peserta pendidikan pada tahun 2019 terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) yang objektif atas pencapaian kinerja/kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai basis evaluasi penyelenggaraan kegiatan ke depan.

Laporan ini memuat berbagai bahasan, mulai dari metodologi yang digunakan hingga substansi evaluasi yaitu Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator, Tingkat Kualitas Layanan Administrasi, dan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana. Selain itu, laporan juga membahas saran dan kritik dari responden serta tindaklanjut hasil survei. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Laporan ini juga merupakan bentuk komitmen dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Semoga laporan survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan ini dapat menjadi cambuk penyemangat bagi perbaikan kualitas kinerja sekaligus peningkatan capaian reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap unit kerja di instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan publik wajib untuk mengadakan survei atau jajak pendapat terkait layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan. Survei ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana tingkat kepuasan layanan masyarakat yang disediakan, kecepatan waktu layanan, kesesuaian layanan yang diberikan, perilaku petugas layanan, dan sarana prasarana layanan publik yang diberikan.

Pada laporan survei kepuasan masyarakat ini, disajikan pengukuran yang diselenggarakan pada tahun 2019, dimana hasil tingkat kepuasan masyarakat, dalam hal ini peserta kegiatan bimtek maupun peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata **“Baik”** atau sebesar 3,37 dari skala (skala 1-4).

Dari 10 komponen yang disurvei, 4 komponen mendapat nilai **“Sangat Baik”** yaitu; (1) Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan dengan nilai 3,50, (2) Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan nilai 3,45; (3) Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia dengan nilai 3,44; dan (4) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,40. Sedangkan 6 komponen survei lainnya mendapatkan nilai **“Baik”** yaitu; (1) Kualitas Materi dengan nilai 3,39; (2) Kualitas Materi dengan nilai 3,37; (3) Metode Pendidikan dengan nilai 3,35; (4) Kualitas Moderator dengan nilai 3,32; (5) Kualitas Jamuan Makanan dengan nilai 3,39; dan (6) Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta dengan nilai 3,15.

Selain itu, saran, kritik, dan komentar dari peserta kegiatan menjadi masukan atau rekomendasi yang berharga bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Meskipun demikian, tidak semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan mengingat rekomendasi dari peserta tidak selalu mencerminkan pendapat keseluruhan peserta. Selain itu, masukan atau rekomendasi dimaksud tidak selalu sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri dan sifatnya *non urgent*. Sedangkan atas masukan, kritik, saran, maupun komentar yang membangun dan sesuai dengan tujuan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terkait penyelenggaraan pendidikan maupun sarana prasarana, menjadi catatan tersendiri untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan ke depannya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, baik dari sisi metodologi maupun indikatornya. Pengembangan dan perbaikannya terus akan dilakukan kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Survei	9
BAB II. METODOLOGI SURVEI.....	11
2.1. Defenisi dan Jenis Survei.....	11
2.2. Metode dan Komponen Survei.....	11
2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
2.4. Teknik Pengolahan Data	20
2.5. Keterbatasan Survei.....	21
BAB III. KARAKTERISTIK RESPONDEN.....	22
3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	22
3.2. Responden Berdasarkan Usia.....	22
3.3. Responden Berdasarkan Pendidikan	24
3.4. Responden Berdasarkan Asal Wilayah	24
BAB IV. PEMBAHASAN HASIL SURVEI.....	27
4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	27
4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator.....	32
4.3. Tingkat Layanan Administrasi.....	36
4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	37
4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan	40
4.6. Tindaklanjut Hasil Survei.....	47
BAB V. PENUTUP.....	50
5.1. Kesimpulan	50
5.1. Rekomendasi	50
LAMPIRAN SURAT TUGAS TIM PENYUSUNAN SURVEI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019	12
Tabel 2.3. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019	17
Tabel 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usia.....	23
Tabel 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah	24
Tabel 4.1.1. Kualitas Materi Selama Tahun 2019.....	27
Tabel 4.1.2. Kualitas Metode Pendidikan Selama Tahun 2019	29
Tabel 4.1.3. Kesesuaian Materi Pendidikan dan Kebutuhan Peserta Selama Tahun 2019	30
Tabel 4.1.4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan Selama Tahun 2019 ...	32
Tabel 4.2.1. Ringkasan Materi.....	33
Tabel 4.2.2. Kualitas Narasumber Selama Tahun 2019	34
Tabel 4.2.3. Kualitas Moderator Selama Tahun 2019.....	35
Tabel 4.3.1. Kualitas Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia Selama Tahun 2019	36
Tabel 4.4.1. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Selama Tahun 2019	37
Tabel 4.4.2. Kualitas Jamuan Makanan Selama Tahun 2019	38
Tabel 4.4.3. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan Selama Tahun 2019	39
Tabel 4.5. Rekapitulasi Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan Selama Tahun 2019	40
Tabel 4.6. Tabel Peringkat Penilaian Komponen Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Grafik 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	23
Grafik 3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	24
Grafik 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah	26

Laporan Survei
Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara (*final and binding*). Hal ini dikarenakan karena lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian norma di bawah UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi, sehingga posisi Mahkamah Konstitusi yang sangat strategis ini, Mahkamah juga dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung ideologi negara (*the protector of the state of ideology*).

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah

Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menegakkan konstitusi dan menciptakan demokrasi yang bermartabat.

Kegiatan pendidikan yang telah diselenggarakan selama ini, khususnya di tahun 2019, memerlukan evaluasi sebagai dasar peningkatan pelayanan dan kinerja di masa yang akan datang. Survei bertema “**Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**” yang dilaksanakan terhadap seluruh peserta pendidikan ini dianggap perlu untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas serta dampak kegiatan pendidikan tersebut. Survei ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapat gambaran efektivitas metode pendidikan, pelayanan, termasuk narasumber dan fasilitator serta materi yang diajarkan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum dilaksanakannya Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C);
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1.3. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT SURVEI

Survei ini bertujuan untuk:

- a) Menggambarkan respon peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b) Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c) Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai penerima manfaat pendidikan;
- d) Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/ kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Adapun sasaran dari survei ini adalah:

- a) Mendorong partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja penyelenggara pendidikan;

- b) Mendorong penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan;
- c) Mendorong penyelenggara pendidikan menjadi lebih efektif dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan manfaat dari survei ini adalah:

- a) Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b) Mengetahui kinerja penyelenggara pendidikan;
- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
- d) Mengetahui indeks kepuasan peserta pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
- e) Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB II. METODOLOGI SURVEI

2.1. DEFINISI DAN JENIS SURVEI

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan, sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena **responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2019** (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. METODE DAN KOMPONEN SURVEI

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan

saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner sendiri menggunakan skala *Likert* dengan empat gradasi kategori yaitu

Tabel 2.2. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019

Skala	Kategori
1 – 1,7	Buruk
1,8 – 2,5	Cukup
2,6 – 3,3	Baik
3,4 - 4	Sangat Baik

Selain itu, komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari:

a) Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Kualitas Materi

Syarat minimal penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media penyajian.

2. Metode Pendidikan

Kesesuaian metode pendidikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta

Materi pendidikan yang diberikan bukan materi yang tidak relevan dan aktual tetapi materi yang mampu menjawab kebutuhan aktual peserta pendidikan.

4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Menilai apakah panitia, moderator, narasumber dan seluruh pihak terkait tepat waktu dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Komponen ini menjadi basis evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas materi, metode pendidikan, kesesuaian materi dan ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden memberikan tanggapan terhadap keseluruhan materi yang disampaikan narasumber, cara penyajian materi, hingga kesesuaian materi

dengan kebutuhan peserta. Selain itu, ketepatan waktu juga menjadi poin penilaian sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya menghargai waktu di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Semua ini menjadi prasyarat akan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tinggi demi meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

b) Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Materi Paling Menarik dan Kurang Menarik

Menilai favorabilitas peserta terhadap masing-masing materi yang diberikan sebagai indikasi materi paling relevan dan aktual bagi peserta pendidikan.

2. Kualitas Narasumber

Menilai kualitas penyampaian materi narasumber yang bisa dilihat dari teknik penyajian materi, kualitas memberikan penjelasan atas pertanyaan peserta dan ketepatan waktu narasumber.

3. Kualitas Moderator

Menilai kualitas moderator sebagai basis perbaikan performa moderator yang akan datang.

4. Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

Berbeda dengan poin pertama (materi paling menarik/kurang menarik), poin ini menilai favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator paling menarik sebagai indikasi akan sosok narasumber dan moderator yang berkualitas bagi peserta pendidikan.

Secara keseluruhan, komponen di atas menilai persepsi peserta terhadap narasumber dan moderator. Peserta kegiatan akan diminta tanggapannya mengenai materi yang paling menarik, dan sebaliknya, materi yang kurang menarik. Peserta juga dimintai tanggapannya mengenai kualitas narasumber pendidikan, apakah sudah cukup baik atau masih perlu perbaikan. Selain itu, ada penilaian terhadap kualitas moderator yang menentukan jalannya sesi materi dan diskusi secara keseluruhan. Terakhir, ada penilaian terhadap narasumber dan moderator paling menarik bagi peserta yang menjadi indikasi favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator.

c) Tingkat Layanan Administrasi

Berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang menilai kualitas materi dan narasumber kegiatan, komponen ketiga berfokus pada upaya evaluasi atas tingkat layanan administrasi kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden dimintai tanggapannya terhadap empat hal terkait pelayanan, yaitu:

1. Aksesibilitas informasi yang terkait dengan kegiatan

Apakah informasi terkait pedoman, jadwal dan mekanisme terkait kegiatan aksesibel atau tidak.

2. Penyelenggara melayani peserta dengan ramah

Unsur keramahan penyelenggara menjadi penilaian sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan. Di samping itu, sikap ramah juga terus diupayakan agar peserta pendidikan merasa nyaman selama menjalani pendidikan di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

3. Pelayanan administrasi kegiatan dapat diselesaikan dengan baik

Poin ini menilai bagaimana kualitas keseluruhan pelayanan, mulai dari awal (registrasi) hingga akhir (pembagian sertifikat) kegiatan

4. Pelayanan administrasi keuangan dapat diselesaikan dengan baik

Poin ini khusus menilai pada pelayanan administrasi keuangan yang menjadi hak dan kewajiban bagi peserta pendidikan untuk dipatuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Komponen terakhir menilai kualitas layanan sarana dan prasarana di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Di dalamnya terdapat empat penilaian, yaitu:

1. Kualitas Sarana dan Prasarana

Menilai kualitas ruang kelas dan aula beserta seluruh fasilitas pendukungnya, mulai dari *sound system*, LCD proyektor, kenyamanan dan kebersihan ruangan, hingga penerangan yang dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik.

2. Kualitas Jamuan Makanan

Menilai kualitas konsumsi yang diberikan kepada peserta sebagai basis evaluasi terhadap penyedia jasa konsumsi. Selain itu, kualitas makanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengikuti jalannya pendidikan.

3. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Mengukur bagaimana persepsi peserta terhadap keamanan dan kenyamanan peserta. Evaluasi ini penting sebagai basis pengambilan kebijakan terkait keamanan dan kenyamanan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Di samping itu, keamanan dan kenyamanan yang baik akan mendorong terselenggaranya kegiatan pendidikan yang berkualitas.

e) Saran dan Kritik dari Peserta

Selain keempat komponen di atas yang kuantitatif sifatnya, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif, yang tersedia dalam kolom saran dan kritik. Di sini, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

2.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Survei ini dilakukan dengan cara daring (*online survey*). Pengumpulan data dalam survei daring dilakukan dengan menggunakan laman (sistem terintegrasi e-Pusdik). Responden yang menjadi populasi survei mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun yang telah diberikan dan bisa diakses dengan **QR code** yang ada di nametag masing-masing peserta.

Keuntungan dalam penggunaan survei daring ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei online juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah dan efisien.

Selain itu, survei ini juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional berbasis lembar angket. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan *online survey* di akun masing-masing peserta pendidikan:

Penilaian oleh Peserta					
NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Materi relevan dengan isu aktual	☐	☐	☐	☐
2.	Materi pendidikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
3.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
4.	Materi pendidikan meningkatkan keterampilan menyampaikan pendapat secara lisan (komunikasi oral)	☐	☐	☐	☐
5.	Materi pendidikan meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim	☐	☐	☐	☐
6.	Waktu penyelenggaraan kegiatan mencukupi kebutuhan	☐	☐	☐	☐
7.	Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan tepat waktu	☐	☐	☐	☐
8.	Materi yang paling menarik	Pilih Materi			
	Materi yang kurang menarik	Pilih Materi			

Peran Narasumber dan Moderator					
9.	Narasumber mampu memberikan informasi yang jelas untuk mencapai hasil terbaik	☐	☐	☐	☐
10.	Narasumber mampu memberikan jawaban yang obyektif terhadap peserta didik	☐	☐	☐	☐
11.	Moderator mampu mengarahkan setiap kegiatan pendidikan	☐	☐	☐	☐
12.	Fasilitator yang paling menarik :				
	A. Narasumber	Pilih Narsum			
	B. Moderator				

Administrasi					
13.	Informasi yang terkait dengan kegiatan (jadwal, peserta, dsb) dapat diakses dengan mudah	☐	☐	☐	☐
14.	Penyelenggara atau panitia melayani peserta dengan ramah	☐	☐	☐	☐
15.	Pelayanan administrasi kegiatan dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara/panitia	☐	☐	☐	☐
16.	Pelayanan administrasi keuangan dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara/panitia	☐	☐	☐	☐

Sarana dan Prasarana				
17.	Fasilitas sarana dan prasarana (ruang kelas dan aula, sound system, LCD proyektor, kenyamanan ruangan, penerangan, dll) dapat menunjang kegiatan dengan baik	☐	☐	☐
18.	Menu makanan yang diberikan sesuai dengan harapan	☐	☐	☐
19.	Peserta merasa aman dilingkungan Pusdik MK	☐	☐	☐
20.	Peserta merasa nyaman dengan kebersihan lingkungan gedung Pusdik MK	☐	☐	☐
21.	Secara umum, berikan pendapat anda mengenai keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara/panitia	SKOR:	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	

Saran dan Perbaikan	
1.	
2.	

Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada tahun 2019 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (23 Kegiatan) dan peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (7 kegiatan), yaitu:

Tabel 2.3. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	Senin - Rabu, 21 - 23 Januari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan I
2	Kamis - Sabtu, 24 - 26 Januari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan II
3	Senin - Rabu, 28 - 30 Januari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem
4	Kamis - Sabtu, 31 Januari - 2 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda

No	Jadwal	Nama Kegiatan
5	Rabu - Jumat, 6 - 8 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya
6	Senin - Rabu, 11 - 13 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik)
7	Senin - Rabu, 11 - 13 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Hotel Rizen)
8	Kamis - Sabtu, 14 - 16 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Senin - Rabu, 18 - 20 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Senin - Rabu, 25 - 27 Februari	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Kamis - Sabtu, 28 Februari - 2 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Senin - Rabu, 4 - 6 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan III
13	Jumat - Sabtu, 8 - 9 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya

No	Jadwal	Nama Kegiatan
14	Senin - Rabu, 11 - 13 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
15	Kamis - Sabtu, 14 - 16 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
16	Jumat - Minggu, 15-17 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta
17	Senin - Rabu, 18 - 20 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)
18	Senin - Rabu, 18 - 20 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan IV
19	Kamis - Sabtu, 21 - 23 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat
20	Senin - Rabu, 25 - 27 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)
21	Kamis - Sabtu, 28 - 30 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
22	Jumat - Minggu, 29 - 31 Maret	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya
23	Kamis - Sabtu, 4 - 6 April	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No	Jadwal	Nama Kegiatan
24	Selasa - Jumat, 20 - 23 Agustus	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
25	Selasa - Jumat, 3 - 6 September	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Buruh/Serikat Pekerja
26	Selasa - Jumat, 17 - 20 September	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Profesi se-Indonesia
27	Selasa - Jumat, 24 - 27 September	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas
28	Selasa - Jumat, 15 - 18 Oktober	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aktivis Perempuan Lintas Agama
29	Selasa - Jumat, 22 - 25 Oktober	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama
30	Senin - Jumat, 12 - 16 November	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional (Anugerah Konstitusi IX 2019)

2.4. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Di sini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (sangat buruk), 2 (buruk), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistika deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.5. KETERBATASAN SURVEI

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara/Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai populasi survei. Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, kondisi populasi masih memungkinkan sebagian kecil responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal dalam taraf kewajaran dapat mewakili keseluruhan populasi. Hal ini menjadi bagian dari keterbatasan survei yang tidak dapat menjamin target keseluruhan populasi.

BAB III. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Hasil dari survei ini dapat digambarkan karakteristik responden sebagai berikut:

3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

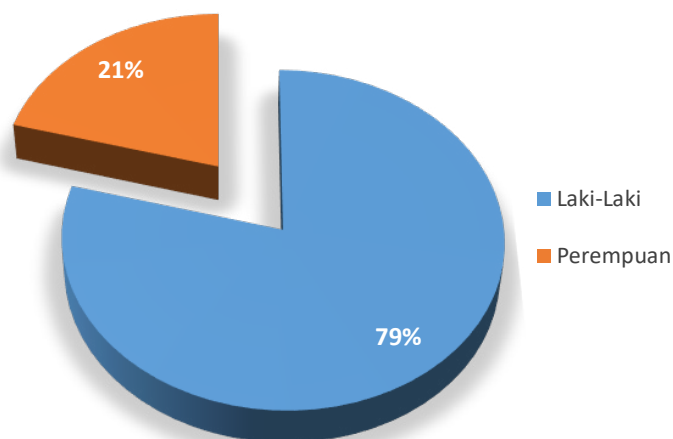
Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	3566	79%
Perempuan	935	21%
Total	4501	100%

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 3.1 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 3566 orang dengan presentase sebesar 79% dan responden perempuan sebanyak 935 orang dengan presentasi sebesar 21%.

Grafik 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



3.2. Responden Berdasarkan Usia

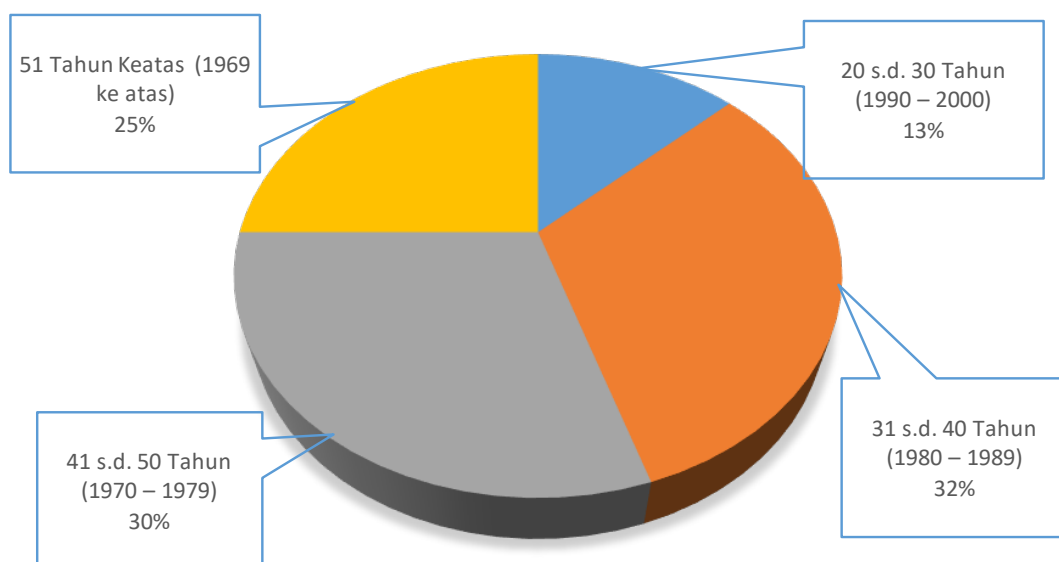
Responden berdasarkan umur dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu kelompok umur dibawah 20 tahun, kelompok 21 s.d 30 tahun, kelompok 31 s.d 40 tahun, kelompok 41 s.d 50 tahun, kelompok 51 tahun ke atas. Jumlah responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	20 s.d. 30 Tahun (1990 – 2000)	585	13%
2	31 s.d. 40 Tahun (1980 – 1989)	1441	32%
3	41 s.d. 50 Tahun (1970 – 1979)	1350	31%
4	51 Tahun Keatas (1969 ke atas)	1125	25%
Jumlah		4501	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok usia 1980 – 1989 menjadi mayoritas responden survei dengan 32%. Sementara itu, kelompok umur 20 s.d. 30 tahun menjadi kelompok umur minoritas dengan 13%.

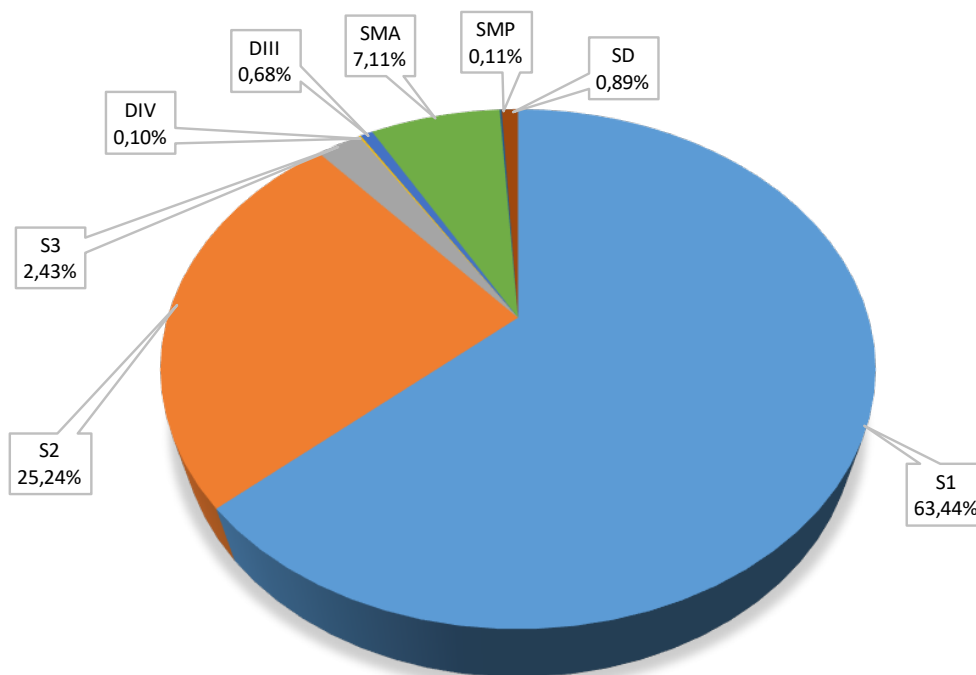
Grafik 3.2. Responden berdasarkan Usia



3.3. Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari grafik di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang beragam, mulai dari SD hingga S3. Mayoritas responden berpendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 63%, diikuti S2 (Master) sebanyak 25%. Sebanyak 2% responden berpendidikan S3 (Doktoral), 1% lebih banyak dibanding responden berpendidikan DIII (Diploma).

Grafik 3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan



3.4 Responden Berdasarkan Asal Wilayah

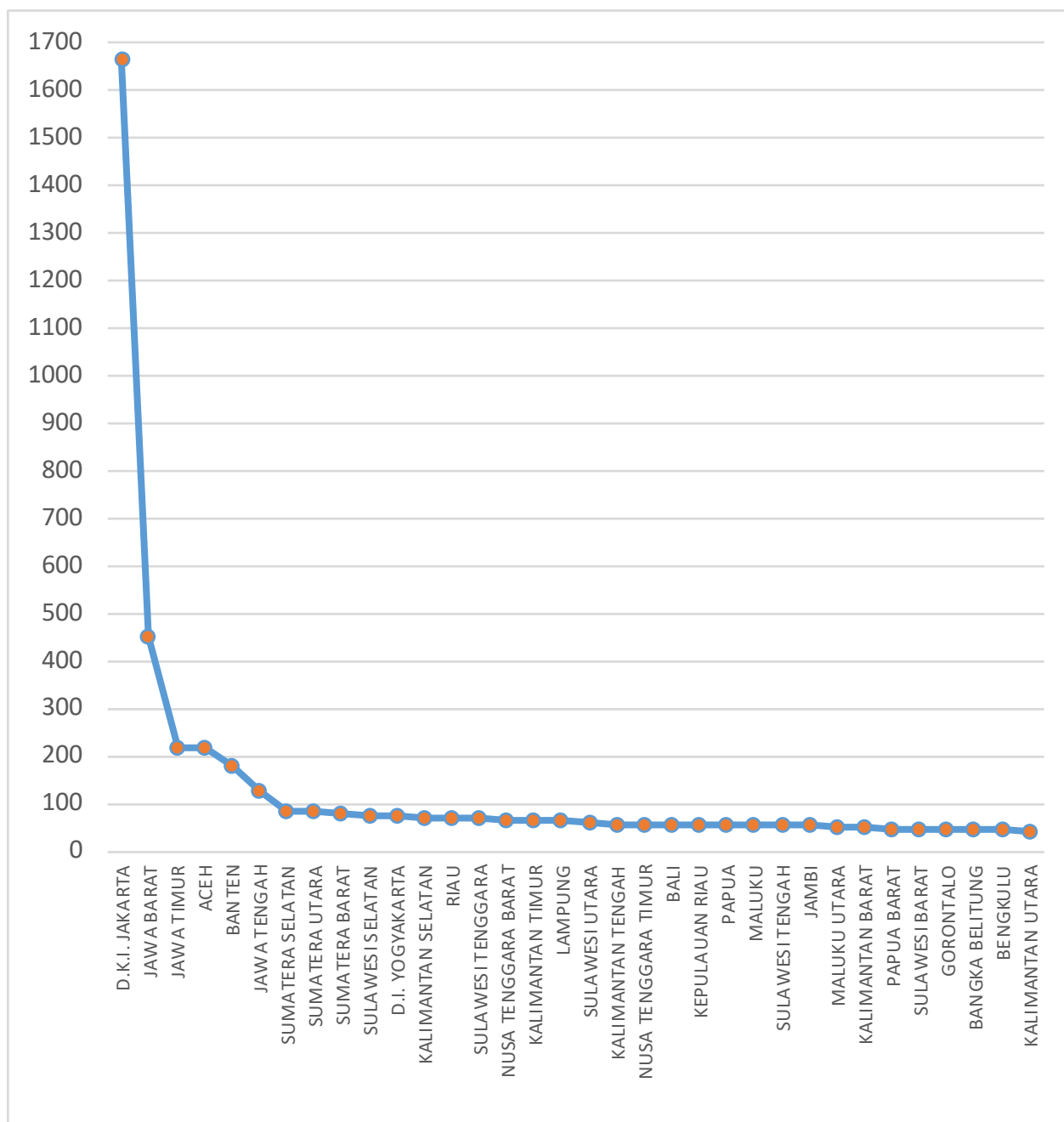
Responden berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing responden menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah

No	Provinsi	Jumlah Responden
1	D.K.I. JAKARTA	1667
2	JAWA BARAT	453
3	JAWA TIMUR	219
4	ACEH	218
5	BANTEN	178
6	JAWA TENGAH	125

No	Provinsi	Jumlah Responden
6	JAWA TENGAH	125
7	SUMATERA SELATAN	84
8	SUMATERA UTARA	82
9	SUMATERA BARAT	77
10	SULAWESI SELATAN	73
11	D.I. YOGYAKARTA	72
12	KALIMANTAN SELATAN	68
13	RIAU	67
14	SULAWESI TENGGARA	67
15	NUSA TENGGARA BARAT	66
16	KALIMANTAN TIMUR	65
17	LAMPUNG	63
18	SULAWESI UTARA	62
19	KALIMANTAN TENGAH	57
20	NUSA TENGGARA TIMUR	55
21	BALI	54
22	KEPULAUAN RIAU	54
23	PAPUA	53
24	MALUKU	53
25	SULAWESI TENGAH	53
26	JAMBI	53
27	MALUKU UTARA	49
28	KALIMANTAN BARAT	48
29	PAPUA BARAT	47
30	SULAWESI BARAT	45
31	GORONTALO	44
32	BANGKA BELITUNG	44
33	BENGKULU	44
34	KALIMANTAN UTARA	42

Grafik 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah



BAB IV. PEMBAHASAN HASIL SURVEI

4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

4.1.1. Kualitas Materi

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Materi paling rendah menurut peserta yaitu 3,18 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara penilaian Kualitas Materi paling tinggi menurut peserta yaitu 3,67 atau sama dengan nilai “sangat baik” didapatkan pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Materi adalah 3,39 atau sama dengan nilai “**baik**”.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian kualitas materi terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian kualitas materi tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.1.1. Kualitas Materi Kegiatan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,67	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia	3,54	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya	3,51	Sangat Baik

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,18	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama	3,21	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA)	3,23	Baik
Rata-Rata Kualitas Materi Tahun 2019		3,39	Baik

4.1.2. Kualitas Metode Pendidikan

Dari 30 kegiatan yang disurvei pada tahun 2019, Metode Pendidikan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,08 atau sama dengan “baik” pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA). Sementara penilaian Metode Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,59 atau sama dengan nilai “sangat baik” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Metode Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,35 atau sama dengan nilai “**baik**”.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian kualitas metode pendidikan terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian kualitas metode pendidikan tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.1.2. Kualitas Metode Pendidikan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,59	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya	3,56	Sangat Baik
3	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia	3,49	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)	3,08	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel Rizen	3,1	Baik
3	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,19	Baik
Rata-Rata Kualitas Metode Pendidikan Tahun 2019		3,35	Baik

4.1.3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta

Dari 30 kegiatan yang disurvei pada tahun 2019, Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta mendapatkan nilai paling rendah yaitu 2,72 atau sama dengan “baik” pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA). Sementara penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta paling tinggi menurut peserta yaitu 3,59 atau sama dengan nilai “sangat baik” pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta berdasarkan hasil survei adalah 3,15 atau sama dengan “baik”.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.1.3. Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,41	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan IV	3,31	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat	3,31	Sangat Baik

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA)	2,72	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	2,96	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya	2,98	Baik
	Rata-Rata Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta Tahun 2019	3,15	Baik

4.1.4 Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Dari 30 kegiatan yang disurvei pada tahun 2019, Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,07 atau sama dengan **“baik”** pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA). Sementara penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,66 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,40 atau sama dengan **“sangat baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei.

Tabel 4.1.4. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,66	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya	3,63	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem	3,6	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)	3,07	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,11	Baik
3	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama	3,13	Baik
Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2019		3,4	Sangat Baik

4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

4.2.1. Materi Paling Menarik

Materi paling menarik menurut peserta berdasarkan jawaban dari pertanyaan terbuka adalah materi tentang “Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU/Pilkada/PHPU/Pilpres”. Berikut adalah ringkasan kurikulum dari materi tersebut:

Tabel 4.2.1. Ringkasan Materi

Sub Materi	Durasi	Metode	Narasumber
Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai : 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (Petitum) Pemohon d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon 3) Permintaan (Petitum) Pihak Terkait b. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Catatan: - Peserta dibagi kedalam 4 kelas - 1 kelas dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok mengerjakan permohonan pemohon dan 1 kelompok mengerjakan Keterangan Pihak Terkait

4.2.2. Kualitas Narasumber

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Narasumber paling rendah menurut peserta yaitu 3,11 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara penilaian Kualitas Narasumber paling tinggi menurut peserta yaitu 3,75 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Narasumber adalah 3,37 atau sama dengan nilai **“baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Narasumber terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Narasumber tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei.

Tabel 4.2.2. Kualitas Narasumber Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,75	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya	3,51	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan II	3,5	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,11	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan III	3,16	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)	3,19	Baik
Rata-Rata Kualitas Narasumber Tahun 2019		3,37	Baik

4.2.3. Kualitas Moderator

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Moderator paling rendah menurut peserta yaitu 3,16 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara penilaian Kualitas Moderator paling tinggi menurut peserta yaitu 3,66 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Moderator adalah 3,32 atau sama dengan nilai **“baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Moderator terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Moderator tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.2.3. Kualitas Moderator Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,66	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya	3,5	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3,44	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama	3,04	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,16	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroce Aceh, Partai SIRA)	3,18	Baik
Rata-Rata Kualitas Moderator Tahun 2019		3,32	Baik

4.2.4. Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

6 (enam) Narasumber paling menarik menurut peserta selama tahun 2019:

1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W.,S.H.,M.C.L.,Ph.D.
2. Kasianur Sidauruk, S.H.,M.H.
3. Dr. Suhartoyo, S.H.,M.H.
4. Dr. Muhidin, S.H.,M.Hum.
5. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H.
6. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

3 (tiga) Moderator paling menarik menurut peserta selama tahun 2019:

1. Nanang Subekti
2. Bangkit Panji Anarogo
3. Imam Margono

4.3. Tingkat Layanan Administrasi

4.3.1. Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia paling rendah menurut peserta yaitu 3,21 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara nilai Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia paling tinggi menurut peserta yaitu 3,75 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia adalah 3,44 atau sama dengan nilai **“baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.3.1 Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,75	Sangat Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia	3,64	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya	3,59	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,21	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA)	3,25	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	3,27	Baik
Rata-Rata Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia Tahun 2019		3,44	Sangat Baik

4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

4.4.1. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas, Puskid MK mendapatkan nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling rendah menurut peserta yaitu 3,13 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling tinggi menurut peserta yaitu 3,77 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Sarana dan Prasarana adalah 3,45 atau sama dengan nilai **“baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.4.1. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,77	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya	3,64	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3,61	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas	3,13	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan I	3,2	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	3,25	Baik
Rata-Rata Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2019		3,45	Sangat Baik

4.4.2. Kualitas Jamuan Makanan

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama, Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling rendah menurut peserta yaitu 2,96 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara nilai Kualitas Sarana dan Prasarana paling tinggi menurut peserta yaitu 3,59 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Jamuan Makanan adalah 3,29 atau sama dengan nilai **“baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Jamuan Makanan terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Jamuan Makanan tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.4.2. Kualitas Jamuan Makanan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,59	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan I	3,5	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3,47	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tokoh Organisasi Lintas Agama	2,96	Baik
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia	3	Baik
3	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aktivis Perempuan Lintas Agama	3,09	Baik
Rata-Rata Jamuan Makanan Tahun 2019		3,29	Baik

4.4.3. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan

Dari 30 kegiatan yang disurvei sepanjang tahun 2019, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA), Pusdik MK mendapatkan nilai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan paling rendah menurut peserta yaitu 3,28 atau sama dengan nilai **“baik”**. Sementara nilai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,77 atau sama dengan nilai **“sangat baik”** pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019. Dengan demikian, nilai rata-rata Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan adalah 3,50 atau sama dengan nilai **“sangat baik”**.

Berikut adalah tabel yang menampilkan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Jamuan Makanan terendah dan 3 kegiatan dengan penilaian Kualitas Jamuan Makanan tertinggi dari 30 kegiatan yang peserta pendidikannya telah disurvei:

Tabel 4.4.3. Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan Selama Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Kegiatan dengan Penilaian Tertinggi			
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional	3,77	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan IV	3,68	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3,65	Sangat Baik
Kegiatan dengan Penilaian Terendah			
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA)	3,28	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel Rizen	3,3	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	3,33	Baik
Rata-Rata Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan Tahun 2019		3,5	Sangat Baik

4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan

Dalam survei peserta pendidikan di berikan 1 pertanyaan terbuka untug menjar-
ing kritik dan saran agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif untuk
perbaikan kedepan. Berikut adalah rekapitulasi saran, kritik, dan komentar yang didapat dari
survei:

**Tabel 4.5. Rekapitulasi Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan
Selama Tahun 2019**

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Materi Pendidikan		
1	Menyesuaikan materi dengan jam kegiatan (materi berat disampaikan di awal acara)	Pusdik MK sudah mendesain urutan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum, dimana materi yang bersifat teoritis disampaikan di awal, dan kemudian diikuti oleh materi tentang pemahaman teknis dan praktek.
2	Utamakan keterampilan individual dengan menambahkan materi terkait permohonan	Untuk kegiatan dengan jenis Bimbingan Teknis, Pusdik MK sudah menambah porsi waktu untuk materi praktek.
3	Pendidikan sejenis dilaksanakan sampai tingkat kabupaten	Menjadi masukan berharga untuk proses penentuan target group ke depan Akan dipertimbangkan untuk penentuan target group mendatan.
4	Kolaborasi materi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
5	Perlu ada bimbingan teknis lanjutan	
6	Materi disesuaikan dengan target milenial atau generasi muda	
Alokasi Waktu Pendidikan		
7	Waktu penyusunan praktek permohonan dan keterangan pihak terkait perlu ditambah	Materi praktik untuk tingkat ekspert/lanjut, ditambah 1 sesi. Untuk penyampaian materi presentasi, TIK dan diskusi, akan dioptimalkan pemanfaatan waktunya sehingga peserta mendapatkan pengetahuan dasar sebagai bekal untuk beracara di MK.
8	Waktu untuk materi tata cara pendaftaran online perlu ditambah agar peserta dapat lebih memahami	
9	Waktu penyelenggaraan kurang/terbatas sehingga materi kurang tuntas	
10	Waktu presentasi, diskusi atau tanya jawab kurang lama, sebaiknya diperpanjang	
11	Waktu ceramah dikurangi dan menambah waktu diskusi	

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Alokasi Waktu Pendidikan		
12	Waktu pendidikan terlalu padat dan cepat	Pendidikan didesain hanya untuk 3 s.d. 4 hari sesuai dengan kurikulum yang sudah dimiliki dan kemampuan anggaran Pusdik MK.
13	Waktu mengerjakan soal masih kurang	Soal Pre dan Post Test sudah dapat dikerjakan secara online sehingga waktu diset otomatis oleh aplikasi ketika peserta mulai mengerjakan soal di <i>gadget</i> masing-masing.
14	Sesuaikan jadwal dengan waktu ibadah dan mohon kelonggaran waktu untuk shalat Ashar dan Isya	Saat ini sudah disesuaikan waktu isyoma mendekati dengan waktu sholat.
15	Waktu istirahat terlalu sebentar	Pusdik Pancasila dan Konstitusi sudah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan kelaziman waktu istirahat yang umum di setiap lembaga pendidikan, bahkan kegiatan proses belajar mengajar selesai sebelum pukul 6 sore.
16	Waktu coffee break ditambah	Waktu <i>coffee break</i> sudah cukup panjang dan sesuai dengan kelaziman waktu <i>coffee break</i> yaitu 30 menit.
17	Awal acara jangan terlalu pagi	Kegiatan dimulai pukul 07.30 saat kondisi tubuh sudah siap untuk menerima pembelajaran.
Metode Penyampaian Materi		
18	Penyampaian materi jangan terlalu cepat	Kritik dan Saran dari peserta terkait narasumber sudah dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi narasumber.
19	Narasumber lebih komunikatif dan berpengalaman	
20	Narasumber memaksimalkan alat peraga dan proaktif	Untuk Tahun 2020 Pusdik MK sudah menyiapkan fasilitas videotron dan audiovisual yang mumpuni untuk mendukung pembelajaran.
21	Metode penyampaian perlu inovasi dan variasi	
22	Metode penyampaian materi lebih komunikatif dan interaktif	
23	Materi TIK perlu penyempurnaan	Kritik dan Saran dari peserta terkait narasumber sudah dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi narasumber
24	Pemaparan materi IT perlu dikemas lebih menarik	
25	Perlu audio visual simulasi suasana persidangan	Akan dikoordinasikan dengan Bagian TIK

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Pengacaraan Kegiatan		
26	Dibentuk koordinator dari peserta (seperti ketua kelas)	Setiap kegiatan telah memiliki PJ baik dari pihak target group yang menjadi mitra kerjasama maupun dari Pegawai Pusdik MK.
27	Kurang ada hiburan saat tegang	Penyelenggara di malam kedua menyiapkan sesi organ tunggal ataupun di setiap pagi hari ada kegiatan senam pagi yang bisa diikuti oleh peserta ketika membutuhkan hiburan.
28	Perlu ice breaking pada sesi siang hari yang cenderung ngantuk	Sudah dilaksanakan pada saat pergantian sesi pagi atau siang.
29	Malam keakraban kurang dikoordinir sehingga peserta tidak mengikuti dengan baik, sebaiknya Panitia memfasilitasi untuk keakraban peserta	Malam keakraban adalah kegiatan hiburan yang difasilitasi untuk keakraban antar peserta dan bersifat tidak wajib (penyelenggara telah menyediakan hiburan organ tunggal untuk malam keakraban).
30	Olahraga setiap hari	Kegiatan olahraga yang difasilitasi telah disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang lain, di luar itu, peserta dapat melakukan kegiatan olahraga mandiri.
31	Perlu kegiatan motivasi agar peserta tidak bosan	Sudah dilaksanakan di beberapa kegiatan pendidikan hak konstitusional warga negara, namun untuk kegiatan yang bersifat <i>outdoor</i> akan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan target grup dan juga anggaran.
32	Harus ada outbond untuk dinamika kelompok	
33	Agar diadakan studi ekskursi ke gedung MK	Akan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan target grup.
Fasilitas Ruang Kelas dan Aula		
34	Suasana kelas dan penataan tempat duduk lebih ditingkatkan kenyamanannya	Penataan aula dan kelas sudah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, dimana aula menggunakan <i>classroom style</i> dan ruang kelas menggunakan <i>u-shape style</i> .
35	Fasilitas audio visual perlu ditingkatkan	Pada akhir 2019 Pusdik telah melakukan perbaikan. Saat ini Pusdik telah memiliki videotron untuk menunjang sarana pembelajaran agar lebih menarik.
36	Layar LCD atau proyektor kurang jelas dan perlu perbaikan	
37	AC di aula terlalu dingin	Mengingat penyejuk udara di aula Pusdik tersentralisasi sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta, namun hal ini menjadi catatan untuk diperhatikan teknisi yang bertugas di Aula.

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Internet		
38	Koneksi jaringan internet perlu ditingkatkan	Fasilitas internet sudah ditingkatkan untuk Tahun 2020. Penambahan fasilitas akses Wi-Fi di beberapa titik gedung Pusdik sudah terpasang.
Jamuan Makanan		
39	Ketersediaan makanan selalu dipantau agar peserta yang datang terakhir tetap mendapatkan makanan	Selama Tahun 2019 pembagian makanan selalu dipantau dan dibagi kepada seluruh peserta secara merata selama dalam jam makan, belum terpantau adanya kehabisan makanan selama tahun 2019 kecuali peserta yang tidak makan pada jam yang telah ditentukan, sehingga kehabisan makanan atau ruang makan tutup.
40	Makanan berupa snack sebaiknya dijatah oleh catering sehingga semua peserta kebagian	Telah ditindaklanjuti langsung pada kegiatan berikutnya snack dibagi dalam wadah untuk setiap peserta, dan <i>coffee break</i> sudah dilakukan pengaturan jam, hal ini dikarenakan <i>coffee break</i> dibuka sebelum jam istirahat, namun hal ini telah ditanggulangi secara baik.
41	Penyediaan konsumsi sebaiknya bekerjasama dengan ahli nutrisi yang kompeten	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
42	Menu makanan sesuai selera nusantara	Pengaturan menu selalu dilakukan pemilihan ulang sesuai karakter daerah yang ikut kegiatan.
43	Menu makanan sebaiknya lebih bervariasi	Menu sudah dilakukan penggantian secara berkala.
44	Menu makanan disesuaikan dengan daerah dingin	Menu sudah dilakukan evaluasi.
45	Menu makanan jangan terlalu banyak yang berminyak	Menjadi catatan untuk diperhatikan Penyelenggara sudah melakukan diversifikasi jenis makanan. Setiap masukan dari kegiatan sebelumnya telah coba diakomodir oleh penyelenggara, namun yang menjadi masalah adalah memenuhi seluruh keinginan peserta mengingat selera setiap orang yang berbeda-beda.
46	Menu makanan bagi yang sedang diet karbo dan perbanyak buah	
47	Menu makan pagi jangan jengkol	
48	Higienitas makanan dan minuman lebih diperhatikan	
49	Makanan dan snack kurang segar	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
50	Pelayanan di ruang makan harus lebih ramah	

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Toilet umum		
51	Toilet wanita basah dan terkadang tidak ada tissue	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
52	Kebersihan toilet perlu diperhatikan	Telah dilakukan penggantian petugas secara berkala
Layanan Kamar (Kamar Mandi di dalam Kamar Peserta)		
53	Tempat/talenan gelas di kamar dibersihkan	Telah dilakukan pembersihan oleh petugas secara berkala.
54	Menyediakan gelas di wastafel untuk wadah sikat gigi	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
55	Kebersihan kamar mandi perlu diperhatikan	
56	Kamar mandi diberi pewangi agar tidak bau	Sudah dilakukan pemberian pengharum toilet.
57	Shower kamar mandi diperhatikan jika ada yang rusak	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
58	Penyediaan keset kamar mandi yang bersih	
59	Memastikan ketersediaan tissue di kamar tidur dan kamar mandi setiap hari	
Layanan Kamar (Kamar Tidur Peserta)		
60	Petugas kebersihan kamar kurang bersih dan cermat dalam membersihkan kamar	Hal ini sudah menjadi catatan khusus bagi petugas kebersihan.
61	Housekeeping tidak selalu <i>standby</i>	Keterbatasan tenaga <i>housekeeping</i> memang menjadi kendala, namun penyelenggara sudah mengupayakan tenaga mancadaya dapat <i>standby</i> di setiap kegiatan belajar mengajar termasuk di lobi-lobi asrama.
62	Kamar terdapat arah kiblat	Sudah terdapat arah kiblat di dalam kamar.
63	Penyediaan sajadah di kamar	Sajadah tidak disediakan di kamar, namun apabila diperlukan/diminta maka akan disediakan oleh petugas.
64	Kamar tidur perlu perbaikan karena ruang kamar kurang besar untuk shalat	Sudah dilakukan perbaikan di setiap kamar. Ukuran tempat tidur sudah direnovasi, sehingga kamar sudah agak lega.
65	Lampu penerangan di kamar diganti dengan LED	Sudah dilakukan penggantian secara bertahap.

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Layanan Kamar (Kamar Tidur Peserta)		
66	Ruang tidur harus lebih wangi	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
67	Sprei diganti tiap hari	Mengingat anggaran pengadaan sprei yang terbatas sejauh ini <i>housekeeping</i> hanya merapihkan tempat tidur seluruh peserta setiap harinya.
68	Sprei dan lantai berdebu di kamar	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
69	Handuk diganti setiap hari	Handuk sudah diusahakan untuk diganti dua kali selama proses kegiatan berlangsung, idealnya memang handuk diganti setiap harinya seperti halnya pelayanan di hotel.
70	Handuk kurang bersih ada serpihan kotoran	Menjadi catatan untuk diperhatikan
71	Setiap kamar diberikan gantungan handuk agar tidak lembap	Sudah ada gantungan handuk dalam kamar mandi.
72	Sisir yang disediakan di kamar sebaiknya lebih besar	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
73	Perlu disediakan medical kit di kamar peserta	Untuk <i>medical kit</i> mengingat sudah adanya fasilitas poliklinik layanan kesehatan 24 jam, maka fasilitas <i>medical kit</i> dibuat secara terpusat, di samping itu juga memudahkan pertanggungjawaban dan pengawasan terkait pemanfaatan fasilitas <i>medical kit</i> jika terpusat.
74	Lemari pakaian apek	Kondisi Cisarua yang berada di dataran tinggi (Puncak) menyebabkan tingginya kelembaban terutama di musim penghujan, sehingga meskipun penyelenggara sudah menyediakan kapur barus di setiap lemari namun hal ini tetap menyebabkan lemari menjadi apek.
75	Setiap ruang kamar diberi TV	Masukan terkait pengadaan TV selalu muncul di setiap kuesioner. Kebijakan pengadaan TV ditiadakan mengingat agar peserta bisa fokus terhadap proses pembelajaran di Pusdik. Penyelenggara sudah menyediakan TV di setiap lobi-lobi asrama.
76	Perhatikan kebersihan lobby kamar	Tenaga <i>housekeeping</i> atau mancadaya sebenarnya selalu membersihkan lobby kamar, namun kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan debu-debu masuk ke dalam kamar dan pembersihan kamar telah dilakukan sehari 1 kali.

NO	KRITIK, SARAN, DAN KOMENTAR PESERTA PENDIDIKAN	TINDAK LANJUT
Fasilitas Lainnya		
77	Sediakan kantin untuk keperluan sehari-hari	Penyelenggara mulai tahun 2020 menyiapkan kantin yang menyediakan kebutuhan perlengkapan mandi ataupun makanan ringan bagi peserta diklat, sementara itu kantin untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dapat dibeli peserta di toko sekitar yang tidak jauh dari lingkungan Pusdik.
78	Perlu adanya koperasi yang menjual <i>merchandise</i> khusus MK	Menjadi catatan untuk diperhatikan
79	Ada fasilitas ATM di lingkungan Pusdik MK	Penyelenggara sudah melakukan penjajakan dengan salah satu bank BUMN terbesar untuk menyediakan ATM di lingkungan Pusdik. Namun, pihak bank belum dapat menyanggupinya mengingat perhitungan biaya operasional dan profitabilitasnya.
80	Perlu penyediaan sepeda untuk berkeliling sekitar Pusdik	Perlu anggaran untuk pengadaan sepeda.
81	Penyediaan payung untuk musim hujan	Sudah disediakan namun terbatas dan harus bergantian, ke depan akan dibangun kanopi penghubung antar gedung.
82	Penyediaan laptop dan komputer dari MK untuk peserta yang tidak punya atau tidak membawa laptop	Peserta diwajibkan membawa laptop pada saat pemanggilan, apabila tidak membawa laptop maka untuk praktik akan disediakan kertas dan pulpen untuk mengerjakan tugas secara manual.
83	Menyiapkan ruang untuk menghangatkan badan	Telah disediakan selimut untuk masing-masing peserta di dalam kamar.
84	Di musholla ada muadzin	Karena kondisi Pusdik berdekatan dengan mesjid sehingga solat 5 waktu cukup azan dari mesjid.
85	Harus ada perpustakaan	Pusdik sudah pernah memiliki perpustakaan, namun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh peserta sehingga ruang perpustakaan Pusdik dialihfungsikan untuk fungsi yang lain. Usulan akan menjadi catatan bagi penyelenggara.
86	Fasilitas kolam renang	Faktor cuaca dan waktu diklat yang singkat, serta lahan yang tidak memungkinkan untuk dibangun kolam renang.
87	Lokasi pelatihan lebih aksesibel bagi tuna netra sehingga dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain	Pusdik saat ini sudah melakukan beberapa renovasi termasuk untuk menunjang sarana dan prasarana kaum disabilitas. Pengadaan lift khusus disabilitas, kamar khusus disabilitas, parkir khusus, dan penyediaan ramp khusus kursi roda sudah tersedia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Ke depannya akan terus dikembangkan fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas.

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	Tindak Lanjut
Fasilitas Lainnya		
88	Interpreter bahasa isyarat perlu ditambah	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
89	Kamar mandi sulit diakses pengguna kursi roda	Sudah tersedia fasilitas khusus disabilitas.
90	Sediakan braille bagi penyandang tuna netra	Menjadi catatan untuk diperhatikan.
91	Colokan listrik kurang sehingga penggunaan laptop menjadi terbatas	Pusdik di setiap kegiatan sudah menyediakan colokan listrik di aula maupun di setiap ruang kelas. Idealnya memang di setiap meja ada colokan listriknya, namun hal ini membutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pengadaan meja yang khusus ada colokan listriknya.

4.6. Tindak lanjut Hasil Survei

Adapun berdasarkan hasil survei setiap komponen, dapat dijabarkan komponen survei yang mendapat penilaian terbaik dan terburuk ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6. Peringkat Penilaian Komponen Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
1.	Kualitas Materi	3,39	Baik	5
2.	Metode Pendidikan	3,35	Baik	7
3.	Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta	3,15	Baik	10
4.	Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	3,4	Sangat Baik	4
5.	Kualitas Narasumber	3,37	Baik	6
6.	Kualitas Moderator	3,32	Baik	8
7.	Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia	3,44	Sangat Baik	3
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,45	Sangat Baik	2
9.	Kualitas Jamuan Makanan	3,29	Baik	9
10.	Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan	3,5	Sangat Baik	1

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tiga Komponen Survei yang mendapat **penilaian tertinggi** dari peserta adalah:

- 1) Nilai 3,50 pada komponen penilaian Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2) Nilai 3,45 pada komponen penilaian Kualitas Sarana dan Prasarana;
- 3) Nilai 3,44 pada komponen penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia.

Sementara itu, tiga Komponen Survei yang mendapat **penilaian terendah**¹ dari peserta yaitu:

- 1) Nilai 3,15 pada komponen penilaian Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta;
- 2) Nilai 3,29 pada komponen penilaian Kualitas Jamuan Makanan;
- 3) Nilai 3,32 pada komponen penilaian Kualitas Moderator.

Komponen pertama, **Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta**, mendapat nilai 3,15 karena penyelenggara menyadari masih kurang bervariasinya materi yang diberikan untuk kebutuhan peserta pendidikan yang beragam. Sampai saat ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki satu kurikulum induk dengan materi yang sifatnya general. Sementara kebutuhan peserta pendidikan yang beragam menuntut adanya materi yang lebih fokus kepada persoalan aktual mereka, seperti Masyarakat Hukum Adat yang membutuhkan pembahasan mengenai Hukum Adat secara tersendiri, Organisasi Profesi dengan pembahasan Hukum terkait Profesi, dan Organisasi Keagamaan yang menginginkan adanya materi terkait Agama dengan relasinya terhadap hukum di Indonesia.

Sejauh ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjawab kebutuhan tersebut dengan mewajibkan setiap narasumber untuk membuat makalah/*paper* yang lebih fokus dan mendalam menjawab kebutuhan peserta. Namun, masih dibutuhkan perbaikan yang sifatnya menyeluruh agar adanya harmoni antara kebutuhan peserta, pelaksanaan pendidikan oleh penyelenggara dan kemampuan narasumber dalam menyajikan materi.

Untuk menindaklanjuti penilaian responden terhadap Kesesuaian Materi Pendidikan dengan Kebutuhan Peserta, penyelenggara telah melakukan analisa kebutuhan diklat dengan melaksanakan review terhadap kurikulum dan peserta kegiatan. Selain itu, penyelenggara juga berupaya menyelenggarakan kegiatan dengan penyajian materi yang lebih aktual dengan persoalan responden di wilayahnya masing-masing.

Terhadap penilaian Kualitas Jamuan Makanan, penyelenggara telah menindaklanjuti dengan terus melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala akan kualitas dan kuantitas konsumsi yang disajikan pihak *catering*. Permasalahan yang ditemui adalah sulitnya penyajian konsumsi yang mampu memuaskan seluruh peserta yang beragam seleranya, dalam jangka waktu yang selama 4 (empat) hari penyelenggaraan kegiatan, sehingga penilaian terhadap

1 Meskipun ketiga komponen tersebut tergolong ke dalam komponen terendah, secara rata-rata ketiganya masih termasuk kategori baik.

konsumsi sepenuhnya bersifat subyektif dan *uncontrolable*. Meskipun begitu, penyelenggara selalu memastikan konsumsi disajikan dalam kondisi terbaik, setidaknya dengan memastikan kehangatan, kesegaran dan kerapihan serta keramahan petugas penyaji konsumsi. Selain itu, penyelenggara juga kerap kali menanyakan pendapat dan masukan responden mengenai peningkatan kualitas konsumsi yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, peningkatan kualitas konsumsi dapat dilaksanakan.

Terakhir, penilaian responden terhadap kualitas moderator. Secara kategoris, kualitas moderator di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dinilai baik oleh responden. Meskipun begitu, terdapat saran dan masukan yang dapat menjadi evaluasi dan cambuk penyemangat bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Beberapa catatan minor seperti moderator perlu lebih mengakrabkan diri dengan peserta dan perlu lebih menguasai jalannya diskusi telah dibahas bersama oleh penyelenggara sehingga ke depan diharapkan moderator dapat meningkatkan performanya.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Survei ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang memberikan respons sebanyak 4501 orang, dengan mayoritas responden 3566 (79%) responden berjenis kelamin laki-laki, berada di *range* usia 31 s.d 40 Tahun (32%), dan berasal dari DKI Jakarta dengan 85% responden.
2. Komponen pelayanan yang mendapat nilai terbaik yaitu Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pendidikan, Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia.
3. Komponen pelayanan yang perlu ditingkatkan yaitu kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, kualitas konsumsi, dan performa moderator. Meskipun masih tergolong kategori baik, ketiganya mendapatkan penilaian terendah dibanding komponen lain. Di sisi lain, penyelenggara telah membahas dan menindaklanjuti evaluasi responden terhadap ketiganya.
4. Seluruh saran dan komentar responden telah melalui proses monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara sehingga saran dan komentar tersebut mayoritas sudah ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

5.2. Rekomendasi

Penyelenggara sudah dan akan terus melengkapi sarana dan prasarana layanan kepada para peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada beberapa kritik, saran, dan evaluasi yang disampaikan oleh peserta yang sudah terakomodir dan ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara. Namun demikian, di masa-masa akan datang, masih perlu ditingkatkan sarana, prasarana, maupun metodologi pembelajaran terkait masukan-masukan dari peserta.

Selain itu, kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan selama tahun 2019 perlu untuk dilakukan perbaikan dan penambahan pertanyaan-pertanyaan terkait indikator-indikator layanan publik yang belum terakomodir dalam pertanyaan kuesioner. Misalnya, pertanyaan terkait perilaku petugas ketika proses registrasi, kecepatan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, dan pelayanan pengaduan terkait pengguna layanan.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

21/2600/07/2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 perlu adanya Tim Penyusun Laporan dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019
- Waktu : Juni s.d. Juli 2020
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM.83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

Digital Signature

[mk648025998200626085537](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 21/2600/07/2020
Tanggal: 27 Juli 2020

**Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019**

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Ardiansyah Salim, S. | : Ketua Tim Penyusun |
| 2. Hatika Al Shafa | : Penulis |
| 3. Ganggas Wibisono | : Penulis |
| 4. Bangkit Panji Anarogo | : Penulis |
| 5. Santhy Kustrihardiani | : Pengolah Data |
| 6. Angga Putri Gardina | : Pengolah Data |
| 7. Fazlur Rahman El Islamy | : Pengolah Data |
| 8. Suhardi | : Pengolah Data |
| 9. Melati Kusuma Wardhani | : Editor |
| 10. Hadian Taofik Rohman | : Editor |



